

POLITIK

LINTAS

Dipotong Rp3,8 Miliar,
DPRD Masih Tawar

ABDUL MUJIB

PROBOLINGGO - Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin akan *refocusing* anggaran perjalanan dinas DPRD sebesar Rp3,8 miliar. Namun menurut DPRD, angka itu terlalu besar. "Setelah Wali Kota Probolinggo undang Ketua dan Wakil DPRD Kota Probolinggo, *refocusing* anggaran perdin (perjalanan dinas, *Red*) sebesar Rp3,8 miliar. Setelah kita gelar rapat pimpinan, hasilnya rapat setuju dana anggaran *refocusing*. Namun jangan Rp3,8 miliar, kalau bisa di bawah itu," ujar Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, Rabu (14/7) kemarin.

Menurut Mujib, DPRD setuju anggaran perjalanan dinas akan digunakan untuk menangani kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Namun Rp3,8 miliar dinilai terlalu banyak. Sebab ada kegiatan atau perjalanan dinas yang tidak bisa ditinggalkan.

Sebelumnya, Wali Kota Hadi menjelaskan bahwa yang di *refocusing* yakni anggaran perjalanan dinas DPRD bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober. Sebab, anggaran penanganan Covid-19 di Kota Probolinggo menipis.

"Kami menagih janji, dan mohon secepatnya keputusan. Karena dana *refocusing* anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Probolinggo sangat dibutuhkan untuk kemanusiaan dan kemaslahatan umat. Mohon jangan diulur-ulur keputusan," kata Hadi yang juga Ketua Satgas Covid-19 Kota Probolinggo. "Karena untuk perjalanan dinas Pemkot sudah kami tiadakan di situasi seperti ini. Lebih baik dana tersebut buat anggaran kemanusiaan dampak pandemi Covid-19 dan PPKM Darurat," pungkasnya. (dtk)

“

Lebih baik dana tersebut buat anggaran kemanusiaan dampak pandemi Covid-19 dan PPKM Darurat

HADI ZAINAL ABDIN

Wali Kota Probolinggo

Masyarakat Rentan Harusnya Dibantu JPS

Ketika Negara Berlakukan PPKM untuk Antisipasi Covid-19

SAMARINDA - Adanya langkah pemerintah dengan menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat, dianggap sejumlah pengamat mestinya harus berbanding lurus dengan perhatian lebih kepada masyarakat yang tergolong rentan. Pasalnya, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Kaltim tidak diikuti dengan perhatian dan kepedulian dalam hal Jaringan Pengaman Sosial (JPS).

Pengamat Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Mulawarman, Sri Murlianti mengatakan sistem negara Indonesia memang tidak siap untuk menghadapi bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini. Hal ini menimbulkan kebingungan dan dilema dalam membuat kebijakan.

Namun perlu diingat dan disadari, saat ini masih banyak masyarakat bawah yang tidak memiliki pekerjaan tetap, yang penghasilannya bergantung pada pendapatan sehari-hari. "Kalau ada batasan dalam PPKM gini kan akhirnya pilihannya tinggal dua, dia mati kelaparan atau karena penyakit," kata Sri kepada *Koran Kaltim*, Rabu (14/7) kemarin.



ILUSTRASI/NET

Seharusnya lanjut dia, ada sistem yang melindungi masyarakat rentan ini. Sebab saat ini masih ada kesenjangan yang dianggap cukup lebar. Sehingga, apabila diterapkan pembatasan-pembatasan, sudah selayaknya juga memberikan perhatian dengan adanya JPS kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Masyarakat yang paling rentan itu harusnya menjadi tanggungan negara. Jadi ketika pemerintah mewajibkan PPKM itu termasuk dengan menjamin kelompok masyarakat yang paling rentan," tukasnya.

KELOMPOK RENTAN

Kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi akibat PPKM di tengah pandemi Covid-19 diharapkan bisa mendapatkan suntikan dana untuk bisa bertahan hidup.

Kejadian pada tahun 2020 lalu sebenarnya dapat dijadikan sebagai pelajaran, di mana pemerintah ternyata tidak memiliki database yang valid, sehingga tersumbatnya bantuan kepada masyarakat. Sementara di 2021 justru tidak dilanjutkan. Hal ini tentu menandakan tidak pernah ada usaha yang serius.

"Jadi pilihannya sekarang, mati kelaparan atau tertular Covid-19. Jadi kan mereka ikhtiar dulu. Kalaupun nanti mati kelaparan atau mati karena Covid-19, paling tidak mereka sudah berikhtiar untuk hidup," tegasnya.

Sementara Pengamat Sosial Budaya dan Dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman (Unmul), Nasrullah Mappatung mengaku bantuan berupa JPS itu sangat diperlukan. Pemerintah menurut dia, seharusnya mengalihkan sebagian besar anggarannya untuk penanganan kesehatan rakyat di masa krisis pandemi seperti sekarang ini. Rakyat perlu diutamakan untuk divaksin dan diberi makan di masa sulit seperti PPKM sekarang ini.

"Anggaran harus dialihkan ke sektor itu. Karena akan sulit meminta rakyat disiplin apalagi bergotong royong ketika lapar. Karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya," sebutnya.

Menyangkut alokasi anggaran kata dia, merupakan persoalan teknis. Bahkan bisa diselesaikan dengan mudah. Karena menurutnya, yang paling penting sekarang adalah keinginan dan keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya. Khususnya para buruh dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta masyarakat berpendapatan rendah di lapisan bawah lainnya yang sangat kesulitan saat ini.

"Pemerintah mestinya konsen di situ," tandasnya. (ay)

Pimpinan Baru Perusda Wajib Selesaikan PR Terdahulu

SAMARINDA - DPRD Kaltim mengingatkan bahwa pimpinan dari Perusahaan Daerah (Perusda) yang baru terpilih pada akhir Juni lalu, mesti menindaklanjuti persoalan-persoalan yang ada di setiap Perusda yang dipimpin. Menurut Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sutomo Jabir hal ini harus menjadi pekerjaan rumah (PR) serius yang diemban para pemimpin baru dimaksud.

Salah satunya seperti adanya temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim. Di mana pada tahun 2019-2020, BPK memberikan catatan bahwa PT MMP belum menyertakan dana sebesar Rp232 miliar ke kas



SUTOMO JABIR

daerah. Kemudian terjadi pemborosan sekitar Rp37 miliar yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Menurutnya, para pimpinan yang baru mengemban amanah dan kewajiban secara menyeluruh.

"Siapapun pemimpinnya, itu melekat ke badan/ lembaga sebagai tanggung jawab direksi," kata Jabir.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap persoalan terdahulu dapat diselesaikan pemimpin yang baru. Menurutnya, sebelum dipilih menjadi direksi ataupun dewan pengawas independen, pastilah para calon pimpinan itu mengetahui dan mempelajari *track record* perusahaan. Karenanya, dapat dipastikan mengetahui apa yang harus dilakukan. Karena



DOK/NET

SELESAIKAN PR: Para pemimpin Perusda yang terpilih baru-baru berdasarkan hasil seleksi diharapkan bisa menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi Perusda yang dipimpin saat ini.

itu, segala PR yang ada tentunya harus dituntaskan segera.

"Kita mau direksi punya jurus, dan membuat Perusda yang dip-

impinnya menjadi lebih bagus lagi," tutur legislator asal daerah pemilihan (dapil) VI meliputi Bontang-Kutai Timur-Berau ini. (ay)

DPR Minta Aturan PPKM Jangan Bikin Bingung Masyarakat



HARUS JELAS: Wakil Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, Sahroni meminta pemerintah memperjelas aturan PPKM agar tak membuat masyarakat bingung.

JAKARTA - Wakil Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Lawan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) DPR RI,

Sahroni menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyampaikan bahwa pemerintah

membuka opsi untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga enam minggu. Diakuinya, PPKM Darurat memang masih dibutuhkan demi menekan laju penyebaran Covid-19. Namun, menurutnya pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dengan kebijakan ini.

"Pemerintah juga harus betul-betul memastikan bahwa warga terpenuhi kebutuhan ekonominya, terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan enggak bisa makan kalau enggak keluar rumah," kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (14/7) kemarin.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR ini, pemenuhan kebutuhan masyarakat perlu benar-benar menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam penyaluran bantuan di berbagai daerah. "Kita lihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan

bahwa PKL (Pedagang Kaki Lima, *Red*) maupun UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Red*) misalnya, itu mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Efek seperti inilah yang harus diantisipasi sekali oleh pemerintah, mengingat kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk," ujarnya.

Selain itu, politisi Partai Nasdem ini juga meminta agar pemerintah tidak memunculkan aturan yang membingungkan. Karena hal ini sangat berpotensi menyebabkan munculnya gesekan di tengah masyarakat.

"Aturan seperti misalnya perkantoran buka, atau tentang rumah ibadah tadinya tidak boleh dan sekarang jadi boleh. Nah, itu menurut saya perlu diantisipasi sosialisasinya *gimana*, agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan," tandas Sahroni. (sin)